

Reklame Ilegal Akan Dertibkan

Audit BPK Pertanyakan Penagihan Pajak Iklan

Borneo Tribune, Nanga Pinoh

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi berencana menertibkan reklame dan balihoo iklan ilegal yang banyak bertebaran di sejumlah toko di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan Retribusi dan Pajak, DPPKAD Kabupaten Melawi, Timardes mengungkap, penerbitan ini dilakukan lantaran pihak-nya sudah mendapatkan teguran dari BPK Provinsi terkait penagihan pajak iklan yang dianggap tidak relevan.

"Beberapa waktu lalu BPK telah melakukan audit dan mereka mempertanyakan mengapa balihoo atau reklame yang banyak terpasang di depan toko tidak ditarik pajaknya," ujar Kepala Bidang (Kabid) Penagihan Retribusi dan Pajak, DPPKAD Kabupaten Melawi, Timardes, belum lama ini.

Timardes mengungkapkan, sesuai aturan reklame atau spanduk yang dipasang di depan toko wajib ditarik pajaknya, karena itu bersifat komersil. Namun yang menjadi persoalan, pihaknya tidak mungkin menarik pajak dari pemilik toko.

"Masak kita harus menagih dengan punya toko, kan tidak mungkin. Sebab yang wajib membayar i-tukan dari biro yang

memasang iklan. Kalau pemilik toko mungkin hanya diberi untuk pelindung dari panas," ucapnya.

Namun, kata Timardes, setelah ada permintaan dari BPK tersebut, pihaknya akan segera menertibkan sejumlah balihoo, spanduk ataupun reklame yang banyak di pertokoan. Langkah ini sekaligus sebagai sosialisasi kepada pemilik toko.

"Nanti kita akan libatkan kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan penertiban," lugasnya.

Timardes menambahkan, langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong PAD Kabupaten Melawi, khususnya dari reklame, balihoo dan iklan lain.

"Selama ini target kita Rp 150 juta per tahun dan itu sudah tercapai. Namun jika nanti jika reklame yang ada di depan toko dikenakan pajak maka target tersebut akan lebih tinggi lagi," timpalnya.

Menurutnya, sektor lain yang bisa mendorong PAD di Kabupaten Melawi

sejajarnya masih cukup banyak. Hanya saja selama ini belum tergarap dengan baik, lantaran belum ada Perda yang mengatur. Seperti pajak, tower alat telekomunikasi, pajak internet dan pajak rumah kos.

"Kendala kita hanya di Perda. Kalau sudah ada Perdanya kemungkinan PAD kita bisa lebih tinggi dari saat ini," ucapnya. (eko)

